



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Nomor : 700/ /031.2/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas  
PU Sumber Daya Air Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2019.

---

Surabaya, 31 Desember 2019

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas PU Sumber Daya  
Air Provinsi Jawa Timur

di

**SURABAYA**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, telah dilakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/247/KPTS/013/2019 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai **84,27** atau predikat **A** dengan interpretasi **Memuaskan**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :



menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
a	Perencanaan Kinerja	35%	27,43	27,43
b	Pengukuran Kinerja	20%	20,63	20,63
c	Pelaporan Kinerja	15%	12,85	12,85
d	Evaluasi Kinerja	10%	5,48	5,86
e	Pencapaian Kinerja	20%	17,50	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	<b>83,86</b>	<b>84,27</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			<b>A (Memuaskan)</b>	<b>A (Memuaskan)</b>

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya.

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Secara umum telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan pada tingkat pimpinan dan jajarannya;
2. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN disemua level, hal yang perlu diperhatikan kecukupan, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program;
3. Mekanisme cascade kinerja sebaiknya berpedoman pada proses bisnis organisasi;
4. Belum melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, PD diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa adanya komitmen kerja bersama dimulai antar bidang yang Holistik, Spasial yang saling terintegrasi;
2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 – 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi selain memperhatikan ketentuan penyusunan Perangkat Daerah;

3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dilingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP;
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di tiap tingkatan berbasis Teknologi Informasi serta sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel;
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja di lingkungan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terima kasih atas perhatian Saudara.

  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bp. Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
2. Bp. Menteri Dalam Negeri
-